

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU BIMBINGAN KONSELING DI PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG

M. Rizqon Al Musafiri¹, Nur Hafifah², Chumeysa Yuslihati Intiha³, Nur Fitria
Fatmawati⁴

^{1,2,3,4}IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

e-mail: [1rizqon@iaida.ac.id](mailto:rizqon@iaida.ac.id), [2nurhafifah@iaida.ac.id](mailto:nurhafifah@iaida.ac.id), [3chumeysa235@gmail.com](mailto:chumeysa235@gmail.com),
[4fatmaaaaaaditya@gmail.com](mailto:fatmaaaaaaditya@gmail.com)

Abstract

Problems related to the needs of counselling guidance teachers in the education unit of PP Darussalam. The purpose of this study is to identify aspects of competence that need to be emphasised in strengthening the competence of counselling guidance teachers at PP Darussalam Blokagung Banyuwangi. This type of research uses quantitative and qualitative approaches (Mix Methode). . Data were obtained from questionnaires and interviews distributed to counselling teachers at units in PP Darussalam Blokagung ranging from SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA. The needs analysis of counselling teachers has 7 main points of problems (1) Teachers are still adapting to counselling materials; (2) the division of tasks between class teachers, students and counselling teachers is not appropriate; (3) counselling teachers do not come from a counselling background; (4) counselling teachers are given other subjects besides counselling; (5) counselling teachers do not have counselling certification; (6) the ratio of counselling teachers is not appropriate; (7) differences in handling between pesantren and schools.

Keywords: *counseling guidance teachers, aspects of counselling teacher competency, PP. Darussalam Blokagung*

Abstrak

Permasalahan yang terkait dengan kebutuhan guru Bimbingan Konseling di unit pendidikan PP Darussalam. Tujuan penelitian ini yaitu Mengenal aspek kompetensi yang perlu mendapatkan penekanan dalam penguat kompetensi guru bimbingan konseling di PP Darussalam Blokagung Banyuwangi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Mix Methode). . Data diperoleh dari kuesioner dan wawancara yang dibagikan kepada guru BK pada unit di PP Darussalam Blokagung mulai dari SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA. Analisis kebutuhan guru BK memiliki 7 poin utama masalah (1) Guru masih beradaptasi dengan materi bimbingan konseling; (2) pembagian tugas antara guru kelas, kesiswaa dan guru BK yang belum sesuai; (3) guru BK bukan berasal dari latar belakang BK; (4) Guru BK diberikan mapel lain selain BK; (5) Guru BK belum

memiliki sertifikasi konseling; (6) Jumlah Rasio guru BK yang belum sesuai; (7) Perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah.

Kata kunci: aspek kompetensi guru BK, Guru BK, PP. Darussalam Blokagung

PENDAHULUAN

Guru memegang peran penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Dalam hubungan ini, salah satu dari tujuh *targets and imperatives for education after 2015*, dari Unesco, yaitu target 6 menegaskan: "By 2030, all governments ensure that all learners are taught by qualified, professionally trained, motivated and well-supported teachers"(UNESCO, 2014). Profesi guru termasuk guru bimbingan konseling di Indonesia mendapatkan momentum sejak diterbitkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru ditetapkan dan diakui secara formal sebagai profesi dalam undang-undang tersebut. Sebagai bagian dari pendidik di sekolah, guru bimbingan konseling atau konselor dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai standar profesi bidang konseling.

Dalam rangka pengembangan kualitas guru di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan dan menggunakan program yang disebut Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau *continuous professional development* (CPD). Program PKB dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penilaian kinerja guru dan sekaligus pembinaan karier guru secara berkelanjutan. Pembinaan karier berkelanjutan (*continuous carrier development*) adalah upaya peningkatan yang meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan pekerjaan, jabatan, dan kehidupannya secara terprogram, terpadu, dan terus menerus (Nasional, 2010).

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan formal yang posisinya diluar penyelenggaraan mata pelajaran, muatan lokal, ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Pelayanan BK merupakan layanan yang menjadi penunjang proses pencapaian tujuan pendidikan. Secara fungsional, bimbingan dan

konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Bimbingan dan konseling membantu peserta didik menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang valid berkenaan dengan diri pribadi dan lingkungannya, khususnya berkaitan dengan kawasan kematangan pendidikan, karir, persoanal, emosional dan sosial.

Pelayanan bimbingan dan konseling telah mendapat tempat di semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Pengakuan ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Tuntutan dan arah standardisasi profesi bimbingan konseling di Indonesia mengacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan konseling. Standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor/guru bimbingan konseling (BK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, standar kompetensi konselor/guru BK distruktur dan dikelompokkan ke dalam empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Cakupan dan butir-butir kompetensi ini kemudian ditetapkan berdasarkan, dengan komposisi, sebagai berikut: (1) Kompetensi Pedagogi, dengan tiga kompetensi inti, meliputi: (a) menguasai teori dan praksis pendidikan, (b) mengaplikasikan perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli, dan (c) menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

Kompetensi Kepribadian, mencakup empat kompetensi inti, yaitu: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, (c) menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan (d) menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetensi Sosial, mencakup tiga kompetensi inti, yaitu: (a) mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, (b) berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, (c) mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi. Kompetensi Profesional mencakup tujuh kompetensi inti, yaitu: (a) menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (b) menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, (c) merancang program bimbingan dan konseling, (d) mengimplementasikan program BK yang komprehensif, (e) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, (f) memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan (g) menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Konselor sekolah memiliki kebutuhan pelatihan unik yang berbeda dari konselor kesehatan mental klinis (Kozlowski & Huss, 2013). Mereka harus disiapkan untuk menjalankan fungsi dalam berbagai peranan untuk membimbing semua siswa pada aspek perkembangan akademik, karir, dan sosial/pribadi (Studer, Oberman, & Womack, 2006). Karena itu, konselor atau guru bimbingan konseling, sebagai pendidik profesional, dituntut menguasai kompetensi sesuai standar kompetensi profesi konselor Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, ada empat bidang kompetensi yang perlu dikuasai oleh konselor sekolah di Indonesia, yaitu, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan kompetensi social.

Permasalahan yang terkait dengan kebutuhan guru Bimbingan Konseling di unit pendidikan PP Darussalam yaitu belum sesuai guru yang mengampu

mata pelajaran Bimbingan Konseling dengan kompetensi ijazah yang dimiliki. Hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di SMP Plus Darussalam menyampaikan bahwa mapel bimbingan konseling diampu oleh guru yang belum sesuai dengan bidangnya. Guru BK yang ada di unit-unit pendidikan PP Darussalam Sebagian besar berasal dari guru mata pelajaran lain. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, akan tetapi perlu diberikan penguatan kompetensi pada guru-guru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebutuhan terkait guru bimbingan konseling dan penguatan kompetensi apa yang perlu diperkuat dalam penanganan siswa di unit PP Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini yaitu (1) Bagaimana gambaran permasalahan yang dialami guru bimbingan konseling di PP Darussalam dalam pengembangan kompetensi? (2) Bagaimana bentuk penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan guru bimbingan konseling di PP Darussalam Blokagung Banyuwangi?

LANDASAN TEORI

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi Pengetahuan Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Tantangan kehidupanpun di era globalisasi akan semakin besar, karena daya saing dari setiap individu yang akan semakin tinggi. Kemampuan individu ini, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan adalah satu langkah yang cukup menentukan keberhasilan individu. Maka dari itu pemerintah menyusun langkah-langkah guna pendidikan dapat mencetak

generasi-generasi penerus bangsa yang siap dengan tantangan-tantangan dunia global.

Untuk memajukan dunia pendidikan, tentunya pemerintah membuat serangkaian pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Pedoman ini berkaitan dengan hal ihwal yang berkaitan dalam pendidikan, seperti salah satunya tenaga kependidikan. Segala peraturan, persyaratan tentang tenaga pendidikan, disusun sedemikian rupa agar siswa-siswa di negara ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik. Agar berjalannya pendidikan yang diharapkan, pemerintah melakukan pengawasan dalam proses-prosesnya. Dengan terpantaunya setiap kegiatan yang ada di dalam pendidikan, pemerintah mengharapkan kegiatan pendidikan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, disusunlah makalah yang berjudul “Peranan Pengawas dalam Organisasi Bimbingan”. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai persyaratan dan fungsi pengawas dalam organisasi bimbingan/pendidikan.

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar guru di mana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan. Dalam suasana seperti ini peserta didik dituntut untuk aktif dan dilibatkan dalam pemecahan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman mereka.

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran.

Guru harus selalu memperbaharui dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi dari berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan tentang materi yang akan disajikan.

Adapun kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional, yaitu: (a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dikuasai; (b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dikuasai; (c) Mengembangkan materi yang dikuasai secara kreatif; (d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri; (f) Konselor mesti memiliki jiwa terbuka dan mampu mengendalikan diri.

Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu bila ia menguasai kecakapan kerja atau keahlian yang selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. (Spencer & Spencer, 2008) mengemukakan *competencies are underlying characteristics of people and indicate "ways of behaving or thinking, generalizing across situations, and enduring for a reasonably long period of time"*. Pendapat ini dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang terdapat dalam diri seseorang dan menunjukkan cara ia bersikap, berpikir dan merespon terhadap situasi yang tinggal dalam diri seseorang dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan Undang-undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan." Berkaitan dengan guru, (Hamalik, 2006) memberikan pengertian kompetensi guru dengan kemampuan

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Selanjutnya, (Brammer & Shostrom, 1977) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful...* “kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.” Sementara (Brammer & Shostrom, 1977) menyatakan bahwa : *competency as rational performance which satisfactory meets the objective for a desired condition*, “kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.”.

Tuntutan dan arah standardisasi profesi bimbingan konseling di Indonesia mengacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan konseling. Standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor/guru bimbingan konseling (BK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, standar kompetensi konselor/guru BK distruktur dan dikelompokkan ke dalam empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Cakupan dan butir-butir kompetensi ini kemudian ditetapkan berdasarkan, dengan komposisi, sebagai berikut: (1) Kompetensi Pedagogi, dengan tiga kompetensi inti, meliputi: (a) menguasai teori dan praksis pendidikan, (b) mengaplikasikan perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli, dan (c) menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

Kompetensi Kepribadian, mencakup empat kompetensi inti, yaitu: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan

memilih, (c) menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan (d) menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetensi Sosial, mencakup tiga kompetensi inti, yaitu: (a) mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, (b) berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, (c) mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi. Kompetensi Profesional mencakup tujuh kompetensi inti, yaitu: (a) menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (b) menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, (c) merancang program bimbingan dan konseling, (d) mengimplementasikan program BK yang komprehensif, (e) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, (f) memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan (g) menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mix Methode*). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dibawah naungan PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi. Sekolah tersebut sudah memiliki guru BK dengan kompetensi yang cukup. Selain itu lokasi yang terintegrasi menjadikan penelitian ini dibutuhkan oleh PP. Darussalam sebagai pengembangan pondok dan unit-unit didalamnya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru BK yang terdapat di unit-unit PP Darussalam Blokagung Banyuwangi sejumlah 17 orang. Pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan keseluruhan guru BK yang berada di unit-unit seperti SD Darussalam 1 Orang, SMP Plus Darussalam 1 Orang, MTs Al Amiriyyah 7 Orang, MA Al Amiriyyah 3 Orang, SMA Darussalam 1 Orang dan SMK Darussalam 4 Orang. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Permasalahan Guru BK di Unit Pendidikan PP Darussalam dalam Pengembangan Kompetensi

Permasalahan guru BK di Unit Pendidikan PP Darussalam dalam pengembangan kompetensi merupakan masalah yang cukup serius dan perlu ditangani dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dan menurunkan kinerja sekolah secara keseluruhan jika tidak segera ditangani secara serius.

Pertama, Guru masih beradaptasi dengan materi bimbingan konseling (Pak AN). *“Saya masih beradaptasi dengan materi tersebut, tapi saya sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang bimbingan konseling.”* Selain itu, salah satu permasalahan yang dihadapi guru BK di Unit Pendidikan PP Darussalam adalah kurangnya akses terhadap sumber belajar yang relevan dan up-to-date (Bu MM). *“Saya mencari sumber belajar yang tersedia di sekolah dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru lain seperti bu Preti, bu Halim yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang ini.”*..

Guru masih beradaptasi dengan materi bimbingan konseling karena guru bimbingan konseling masih baru mendapatkan tugas di sekolah dan guru belum memiliki cukup pengalaman dalam mengelola program tersebut. Hal ini disampaikan oleh guru SD Darussalam bahwa *“saya masih beradaptasi dengan bimbingan konseling di sekolah dasar karena basic pengajaran saya bukan bimbingan konseling. Tetapi saya masih selalu belajar tentang bagaimana guru bk menangani siswa di tingkatan SD”*. Guru juga masih proses belajar memahami teori-teori yang digunakan dalam bimbingan konseling dan cara mengaplikasikannya dalam situasi sekolah yang dinaungi. Disampaikan pula *“ketika kurang paham dengan konseling, saya biasanya belajar dengan Bu Preti selaku guru senior yang cukup paham tentang bimbingan konseling”*. Hal ini menunjukkan bahwa guru masih terus belajar cara bekerja dengan profesional bimbingan konseling di lingkup unit pendidikan PP Darussalam dalam tahapan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

Guru belajar cara mengenali tanda-tanda awal masalah yang dihadapi siswa dan mengetahui cara mengatasinya. *“ketika menghadapi siswa yang sedang ada*

permasalahan, saya selalu berusaha mencari informasi melalui tanggapan korban, pelaku dan saksi. Sehingga saya dapat memberikan solusi yang tepat kepada siswa yang memiliki permasalahan tersebut". Guru belajar cara mengelola dan menyimpan data siswa yang dikumpulkan selama sesi bimbingan konseling, serta menyampaikan hasil bimbingan konseling kepada orang tua siswa dan pihak sekolah yang berwenang.

Guru juga beradaptasi tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi siswa selama sesi bimbingan konseling. Seperti penyelesaian masalah keluarga, masalah social dengan teman, masalah akademis di sekolah maupun diniyah, dan masalah emosional siswa yang kadang kurang terkontrol. Cara mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan profesional, serta memahami teori bimbingan konseling dalam mengatasi masalah yang muncul selama sesi bimbingan konseling.

Meskipun guru masih beradaptasi dengan materi bimbingan konseling, mereka harus terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini menjadi hal yang penting, agar program bimbingan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Guru harus terus berkoordinasi dengan profesional bimbingan konseling lainnya dan bekerja sama dengan pihak sekolah lainnya untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan konseling di sekolah.

Kedua, Pembagian tugas antara guru kelas, kesiswaan dan guru bimbingan konseling. Pembagian tugas pokok dan fungsi antara guru kelas, guru bimbingan konseling dan kesiswaan masih belum diatur dengan tepat (Pak AN dan Bu MM). *"Di SD Darussalam seringkali penanganan permasalahan siswa langsung ditangani oleh kesiswaan. Tidak berurutan dari guru kelas, guru BK lalu ke kesiswaan. Jadi sebaiknya perlu diatur tupoksi yang jelas, batasan penanganan guru kelas sampai dimana, penanganan guru BK sampai ditahap mana, dan wilayah kesiswaan dimana"*. Hal ini

menunjukkan perlunya pembagian penanganan siswa agar memiliki struktur yang baik dan sesuai tupoksi pelaksanaan.

Pembagian tugas antara guru kelas, kesiswaan dan guru bimbingan konseling belum sesuai karena belum adanya komunikasi yang efektif antara ketiganya. “kendala yang sering saya alami adalah tidak adanya tugas yang jelas antara guru kelas, wali kelas, kesiswaan dan guru BK”. Guru kelas belum memahami prosedur yang tepat ketika bekerja dengan guru bimbingan konseling dan kesiswaan, sehingga mereka kurang sesuai prosedur saat bekerja sama dalam mengatasi masalah siswa. Hal ini menyebabkan guru kelas seringkali harus menangani masalah siswa secara mandiri.

Selain itu, guru kelas, kesiswaan dan guru bimbingan konseling juga kurang memiliki pemahaman yang sama tentang tugas masing-masing. Guru kelas belum memahami apa yang diharapkan dari guru bimbingan konseling dan kesiswaan dalam hal penanganan yang diberikan kepada siswa. Guru bimbingan konseling dan kesiswaan kurang memahami yang diinginkan dari guru kelas dalam penanganan yang diberikan kepada siswa. Oleh sebab itu perlunya komunikasi yang efektif dalam pembagian tupoksi antara guru kelas, kesiswaan dan guru bimbingan konseling agar lebih terpadu dalam menyelesaikan permasalahan siswa.

Dikarenakan pembagian tugas penanganan siswa yang belum sesuai, masalah siswa seringkali tidak ditangani dengan cepat dan efektif. Siswa kurang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan masalah mereka menjadi semakin parah. Hal ini dapat menyebabkan masalah disiplin di sekolah karena siswa tidak merasa didukung oleh guru dan pihak sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara guru kelas, kesiswaan dan guru bimbingan konseling. Mereka perlu bekerja sama dalam menentukan tugas masing-masing dan mengatur cara kerja yang efektif. Juga perlu ada komunikasi yang lebih baik antara ketiganya agar dapat

bekerja sama dalam mengatasi masalah siswa dan meningkatkan efektivitas program bimbingan konseling di sekolah.

Ketiga, Guru bimbingan konseling bukan berasal dari latar belakang BK. Sebagian besar guru bimbingan konseling di unit pendidikan PP Darussalam tidak memiliki latar belakang Bimbingan dan Konseling (Pak SW). *“sebagai guru yang diamanahi mengampu bimbingan konseling basic pendidikan saya adalah Bahasa Inggris. Hal ini memang tidak begitu berpengaruh dalam menangani siswa karena memang guru BK itu wajib memiliki sikap mengayomi dan peduli terhadap siswa”*. Latar belakang pendidikan masih bisa dilemngkapi dengan diskusi dengan yang lebih ahli atau mengikuti pelatihan bimbingan konseling yang diadakan IAIDA ataupun MGBK Kabupaten Banyuwangi.

Guru bimbingan konseling yang bukan berasal dari latar belakang Bimbingan konseling sedikit mengalami kesulitan dalam mengelola program bimbingan konseling di sekolah. Karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dalam bidang ini, mereka merasa kurang memahami teori-teori yang digunakan dalam bimbingan konseling dan cara mengaplikasikannya dalam situasi sekolah tempat mereka mengajar. Selain itu, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola program bimbingan konseling.

“Dikarenakan basic saya bukan di bimbingan konseling, seringkali dalam menangani siswa, saya tidak sesuai dengan Teknik maupun metode dalam bimbingan konseling. Hal ini kadang menjadi kendala juga dalam menyelesaikan permasalahan siswa”.

Guru bimbingan konseling yang bukan berasal dari latar belakang Bimbingan konseling sering kali mengalami kesulitan dalam mengenali tanda-tanda awal masalah yang dihadapi siswa. *“masalah siswa yang datang ke saya, biasanya malah kepala sekolah dahulu yang mendapatkan informasi dari wali siswa ataupun dari keamanan. Kadang saya selaku guru BK mengetahui*

permasalahan siswa dari bapak kepala sekolah, baru menugaskan guru BK untuk menyelesaikan masalahnya". Guru juga kesulitan dalam mengelola dan menyimpan data siswa yang dikumpulkan selama sesi bimbingan konseling, "seringnya administrasi yang dimiliki sekolah kurang lengkap dalam mencatat permasalahan siswa, sehingga kami dari guru BK masih terus berusaha memperbaiki kelengkapan administrasi terkait penanganan masalah siswa". Guru juga perlu menyampaikan hasil bimbingan konseling kepada orang tua siswa dan pihak sekolah sesuai dengan administrasi yang dicatat ketika sesi konseling.

Selain itu, guru bimbingan konseling yang bukan berasal dari latar belakang Bimbingan konseling sering mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa selama sesi bimbingan konseling, seperti masalah keluarga, masalah sosial, masalah akademis, dan masalah emosional. Mereka kurang memiliki keterampilan yang cukup untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang efektif dan profesional.

Meskipun demikian, guru bimbingan konseling yang bukan berasal dari latar belakang Bimbingan konseling dapat meningkatkan kompetensinya dengan belajar dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bimbingan dan konseling. Mereka dapat mengambil kursus atau pelatihan yang relevan, dan berkoordinasi dengan profesional bimbingan konseling LBKD untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan konseling di sekolah.

Keempat, Guru Bimbingan Konseling diberikan mata pelajaran selain BK. Guru bimbingan konseling di unit pendidikan PP. Darussalam juga mengampu mata pelajaran lain diluar BK (Bu LF). "selain ditugasi sebagai guru BK saya juga mengajar mata pelajaran lain yang kadang mengganggu waktu konseling siswa, akan tetapi saya biasanya janjian dulu dengan siswa jika mereka ingin sesi curhat dilaksanakan". Berdasarkan pendapat itu menunjukkan bahwa guru BK yang ada di unit pendidikan mengampu mata pelajaran lain sehingga sesi konseling yang harusnya bisa focus, sering terganggu dengan jadwal mengajar. Akan tetapi solusi

yang guru lakukan adalah dengan menyediakan waktu tertentu untuk siswa yang ingin curhat, atau janji terlebih dahulu agar siswa tidak merasa kecewa karena belum bisa curhat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Guru Bimbingan Konseling karena diberikan mata pelajaran selain Bimbingan Konseling adalah kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola program bimbingan konseling di sekolah. Karena mereka diberikan mata pelajaran lain selain bimbingan konseling, mereka kurang memiliki waktu untuk menyelenggarakan sesi bimbingan konseling dan mengelola program bimbingan konseling secara efektif.

Selain itu, guru bimbingan konseling yang diberikan mata pelajaran selain bimbingan konseling juga mungkin merasa kurang fokus dalam mengelola program bimbingan konseling. Karena mereka harus memikirkan mata pelajaran lain yang harus diajarkan, mereka kurang dapat memberikan perhatian yang cukup dalam mengelola program bimbingan konseling.

Guru Bimbingan Konseling yang diberikan mata pelajaran selain Bimbingan Konseling juga kesulitan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang bimbingan konseling. Karena mereka harus mengajar mata pelajaran lain, mereka kurang memiliki waktu untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang bimbingan konseling.

Hal ini juga dapat menyebabkan program bimbingan konseling di sekolah kurang efektif karena guru bimbingan konseling tidak dapat memberikan perhatian yang cukup dan tidak dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ini. Siswa kurang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan masalah mereka malah semakin parah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada perencanaan yang baik dari pihak sekolah dalam menentukan tugas dan mata pelajaran yang diberikan kepada guru Bimbingan Konseling. Pihak sekolah harus memberikan waktu yang cukup dan

tenaga kepada guru Bimbingan Konseling untuk mengelola program Bimbingan Konseling secara efektif dan memberikan perhatian yang cukup dalam bidang ini.

Kelima, Guru belum memiliki sertifikasi konseling (Pak RJ dan Bu EL). Pada dasarnya guru BK sekolah di unit pendidikan PP Darussalam merupakan guru mapel lain yang diperbantukan untuk menangani Bimbingan Konseling. Oleh sebab itu mayoritas guru belum memiliki sertifikasi konseling. Akan tetapi pengembangan metode konseling maupun pengembangan cara menangani siswa dapat dimaksimalkan dengan cara berdiskusi dengan para ahli konseling.

Permasalahan yang dihadapi oleh Guru Bimbingan Konseling yang belum memiliki sertifikasi konseling adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bimbingan konseling. Karena mereka belum memiliki sertifikasi, mereka kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang teori-teori yang digunakan dalam bimbingan konseling dan cara mengaplikasikannya dalam situasi siswa yang dihadapi. Selain itu, mereka juga belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola program bimbingan konseling.

Guru Bimbingan Konseling yang belum memiliki sertifikasi juga kesulitan dalam mengenali tanda-tanda awal masalah yang mungkin dihadapi siswa dan mengetahui cara mengatasinya. Mereka juga merasa sedikit kesulitan dalam mengelola dan menyimpan data siswa yang dikumpulkan selama sesi bimbingan konseling, serta mengetahui cara menyampaikan hasil bimbingan konseling kepada orang tua siswa dan pihak sekolah sesuai kaidah administrasi bimbingan dan konseling.

Selain itu, Guru Bimbingan Konseling yang belum memiliki sertifikasi juga mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa selama sesi bimbingan konseling, seperti masalah keluarga, masalah sosial, masalah akademis, dan masalah emosional. Mereka kurang memiliki keterampilan yang cukup untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang efektif dan profesional.

Hal ini juga dapat menyebabkan program bimbingan konseling di sekolah kurang efektif karena guru bimbingan konseling kurang memiliki pengetahuan yang cukup. Siswa akhirnya kurang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya dari pihak sekolah dan guru bimbingan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling harus mengambil kursus atau pelatihan yang relevan dan mengajukan sertifikasi konseling untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan konseling di sekolah.

Keenam, Jumlah rasio guru BK dengan jumlah siswa yang belum sesuai. Idealnya guru BK disekolah berjumlah 1:150, yaitu 1 guru menangani 150 siswa (Bu MM dan Bu EL). Tapi Sebagian besar unit pendidikan PP Darussalam Khususnya di unit SMK, MA dan SMA masih perlu penambahan personil. Karena jumlah siswa yang ditangani sudah terlalu banyak, maka perlu penambahan tenaga untuk membantu mencari solusi permasalahan bagi siswa.

Permasalahan terkait jumlah rasio guru Bimbingan Konseling yang tidak sesuai adalah kurangnya bantuan yang diterima oleh siswa dalam masalah yang dihadapi. Jika jumlah guru Bimbingan Konseling tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka setiap guru akan memiliki jumlah siswa yang lebih banyak untuk ditangani. Ini akan menyebabkan guru tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa dan menyebabkan siswa tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Selain itu, jumlah rasio guru Bimbingan Konseling yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan masalah dalam mengelola program bimbingan konseling secara efektif. Karena jumlah guru tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka guru tidak dapat menyelenggarakan sesi bimbingan konseling secara rutin dan mengelola program bimbingan konseling dengan baik.

Hal ini juga dapat menyebabkan masalah disiplin di sekolah karena siswa tidak merasa didukung oleh guru dan pihak sekolah. Jumlah rasio guru Bimbingan Konseling yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan permasalahan dalam memberikan laporan yang tepat dan akurat kepada pihak sekolah dan orang tua siswa tentang kondisi siswa dan hasil bimbingan konseling.

Ketujuh, Perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah. Pada beberapa kasus, guru BK sekolah tidak mengetahui jika siswa tersebut memiliki masalah di pondok (Bu MM). Guru BK baru mengetahui pada saat siswa sudah di skors ataupun dikeluarkan dari pondok. Oleh sebab itu perlu koordinasi yang tepat agar penanganan siswa/santri yang bermasalah bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan sekolah agar terjalin komunikasi yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah terkait bimbingan dan konseling adalah metode yang digunakan dalam menangani masalah yang dihadapi siswa. Di pesantren, metode yang digunakan lebih bersifat spiritual dan religius, sedangkan di sekolah metode yang digunakan lebih bersifat psikologis dan akademis. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa karena tidak sesuai dengan metode yang digunakan. “pernah ada kasus siswa yang mengalami permasalahan di pesantren, ketika guru bk ingin menangani secara konseling, ternyata anak tersebut sudah mendapatkan hukuman dengan dikeluarkan dari pesantren. Oleh sebab itu perlunya kesamaan penanganan antara pesantren dan sekolah”

Selain itu, perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah juga dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antara kedua lembaga. Pesantren dan sekolah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah yang dihadapi siswa sehingga kedua lembaga mungkin kesulitan dalam bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa.

Perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah juga dapat menyebabkan masalah dalam memberikan bantuan yang tepat kepada siswa. Siswa tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua lembaga.

Hal ini dapat menyebabkan siswa tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan masalah mereka mungkin semakin parah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pesantren dan sekolah dalam menangani masalah yang dihadapi siswa agar dapat memberikan bantuan yang tepat dan efektif.

Bentuk Penguatan Kapasitas yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Keadaan Guru Bimbingan Konseling di Unit Pendidikan PP Darussalam

Bentuk penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Guru Bimbingan Konseling di Unit Pendidikan PP Darussalam dapat meliputi pelatihan dan kursus yang relevan dengan bidang bimbingan konseling. Pelatihan ini dapat diikuti oleh guru bimbingan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini. Selain itu, pelatihan ini juga dapat memfokuskan pada pengembangan keterampilan dalam mengenali tanda-tanda awal masalah yang mungkin dihadapi siswa, dan cara mengatasinya.

Sertifikasi profesional dalam bidang bimbingan konseling juga dapat menjadi bentuk penguatan kapasitas yang sesuai (Pak SW). Dengan sertifikasi ini, guru bimbingan konseling dapat membuktikan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang ini, serta menjadi pemegang standar yang harus dicapai oleh guru bimbingan konseling lainnya.

Program coaching atau mentoring dari rekan sejawat yang berpengalaman dalam bidang bimbingan konseling juga dapat menjadi bentuk penguatan kapasitas yang sesuai (Bu MM). Guru bimbingan konseling dapat belajar dari rekan sejawat yang berpengalaman dalam mengatasi masalah yang mungkin dihadapi dalam bidang ini dalam hal ini dimentori oleh Bu Halimatus

Sa'diyah, S.Psi., MA. Selaku ketua Lembaga Bimbingan Konseling Darussalam dan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Selain itu, sekolah juga dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi guru bimbingan konseling untuk menyelenggarakan sesi bimbingan konseling dan mengelola program bimbingan konseling secara efektif (Bu EL). Fasilitas ini dapat berupa ruang konseling, peralatan, dan bahan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini menjelaskan tentang 3 poin utama dalam analisis kebutuhan dan penguatan guru Bimbingan Konseling di Unit Pendidikan PP. Darussalam Blokagung. Analisis kebutuhan guru BK memiliki 7 poin utama masalah (1) Guru masih beradaptasi dengan materi bimbingan konseling; (2) pembagian tugas antara guru kelas, kesiswaa dan guru BK yang belum sesuai; (3) guru BK bukan berasal dari latar belakang BK; (4) Guru BK diberikan mapel lain selain BK; (5) Guru BK belum memiliki sertifikasi konseling; (6) Jumlah Rasio guru BK yang belum sesuai; (7) Perbedaan penanganan antara pesantren dan sekolah.

Untuk meningkatkan kompetensi guru bimbingan konseling di Unit Pendidikan PP Darussalam, diperlukan bentuk penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan guru. Penguatan kapasitas yang dibutuhkan oleh guru Bimbingan Konseling di Unit-unit pendidikan PP. Darussalam terbagi kedalam 3 poin yaitu sertifikasi profesional, program coaching atau pelatihan dari profesional dan fasilitas konseling yang representative.

DAFTAR PUSTAKA

- Brammer, L. M., & Shostrom, E. L. (1977). *Therapeutic psychology: Fundamentals of counseling and psychotherapy*. Prentice-Hall.
- Hamalik, O. (2006). *Proses belajar mengajar*.

- Kozlowski, K. A., & Huss, S. (2013). Training of school counselors. *ACA Vistas*.
- Nasional, K. P. (2010). Pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). *Kementrian Pendidikan Nasional*.
- Pandang, A., & Anas, M. (2018). Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Penguatan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, 1(1), 1–16.
- Spencer, L. M., & Spencer, P. S. M. (2008). *Competence at Work models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Studer, J. R., Oberman, A. H., & Womack, R. H. (2006). Producing evidence to show counseling effectiveness in the schools. *Professional School Counseling*, 385–391.
- UNESCO. (2014). UNESCO education strategy 2014-2021. Retrieved November 25, 2022, from UNESDOC Digital Library website: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288>